



Inkuiri-Reflektif: Paradigma Pendidikan IPS yang Terabaikan

Mohammad Imam Farisi ✉

Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Terbuka, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juli 2016

Disetujui Agustus 2016

Dipublikasikan September 2016

Keywords:

Paradigm, inkuiri-reflektif, ips education. Philosophical inquiry.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan hasil telaah filosofis (*philosophical inquiry*) atas eksistensi dan pengembangan paradigma inkuiri-reflektif dalam pengembangan konseptualisasi PIPS dan kurikulum sekolah (SD—SMA). Fokus analisis adalah kompetensi yang harus dicapai (*tujuan*); apa dan bagaimana cara/pendekatan yang perlu dilakukan (*metode*); dan apa hal-hal bermakna yang perlu diberikan (*konten*) agar metode dan tujuan dapat dicapai atau diwujudkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan paradigma inkuiri-reflektif di tingkat komunitas PIPS masih merupakan wacana akademik, dan belum menjadi konsensus atau komitmen bersama. Bahkan, ada indikasi kuat pengembangan paradigma inkuiri-reflektif PIPS di Indonesia mengalami 'stagnasi'. kurikulum PIPS juga belum konsisten memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir inkuiri-reflektif secara utuh.

Abstract

This paper describes the result of philosophical inquiry about the existence and development of inquiry-reflective paradigm of the Social Studies in the scholar community thoughts, and the curriculum development within the schools' level. Analysis focused on the social studies competences to be achieved (objectives); approaches need to be done (methods); learning contents need to be given (content). The analysis shows that the development paradigm-reflective inquiry at the social studies community is still the academic discourse, and not been yet a shared commitment. In fact, there are strong indications of the paradigm in Indonesia have 'stagnant'. The Social Studies curriculum also not consistently provides space for the development of inquiry-reflective thinking skills in a whole.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
E-mail: imamfarisi@ut.ac.id

ISSN 0216-0847

PENDAHULUAN

Para pakar sepakat bahwa Pendidikan IPS (PIPS) adalah sebuah disiplin ilmu terintegrasi (*the integrated study*) dan sebagai program sekolah (*the school program*) yang mensinergikan dua atau lebih disiplin ilmu secara terintegrasi (Becker, 1965; Saxe, 1991; McCutcheon, 2001; Somantri, 2001; NCSS; 1993; 1994; 2010). Seperti halnya disiplin ilmu yang lain, PIPS juga memiliki paradigma atau tradisi keilmuan yang menyediakan kerangka atau model konseptual tentang masalah dan pemecahan bagi setiap anggota komunitas ilmu (Kuhn, 1970:viii,10) terkait dengan tujuan, konten, dan metode PIPS. Paradigma atau tradisi keilmuan dalam PIPS tersebut adalah transmisi kewarganegaraan, ilmu sosial, inkuiri-reflektif, kritisisme sosial secara cerdas, dan pengembangan personal (Barr, Barth, & Shermis, 1977; 1978; Martorella, 1985; NCSS, 1993; 1994; 2010). Sebagai wacana akademik, kelima paradigma tersebut juga diakui dan berpengaruh kuat dalam pengembangan pemikiran komunitas PIPS, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS, sejak 2002 diubah menjadi HISPISI—Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial) maupun kurikulum sekolah.

Namun, hingga kini belum ada ikhtiar yang sungguh-sungguh dan konsensus akademik dari para pakar untuk menjadikan inkuiri-reflektif sebagai paradigma bersama dalam komunitas PIPS maupun dalam kurikulum sekolah. Di Indonesia paradigma ini masih sebatas wacana tanpa konsensus, dan terkesan "terabaikan". Dinamika pemikiran PIPS di Indonesia seakan 'telah selesai atau berakhir' pasca penerimaan definisi konseptual PIPS tahun 1991 dan menjadi "*position paper*" HISPIPSI/HISPISI tahun 1998 (Somantri, 2010). Sementara, belakangan ini muncul dinamika baru dalam konseptualisasi kewarganegaraan transformatif (*transformative citizenship*) (Banks, 1995; 2009; Lee, 2000) yang meniscayakan perlunya reinterpretasi dan rekonstruksi dasar-dasar pemikiran epistemologis PIPS ke arah yang lebih rekonstruktif dan transformatif bagi pembentukan kompetensi dan karakter kewarganegaraan yang lebih mampu

beradaptasi dan berpartisipasi aktif di dalam keberagaman masyarakat dan globalisasi.

Dalam disiplin PIPS, studi demikian sangat krusial dan fundamental untuk menemukan penjelasan komprehensif tentang dasar-dasar pemikiran PIPS sebagai disiplin ilmu dan program pendidikan. Ia terkait erat dengan pembentukan dan perkembangan definisi-definisi paradigmatis yang di dalamnya memuat berbagai rasional, tujuan, konsepsi, landasan filosofi, dan isu-isu normatif lain tentang PIPS sebagai objek-objek studi dan sebagai fondasi utama terbentuknya tradisi/paradigma PIPS. Namun diakui pula, studi seperti ini masih langka atau relatif baru, dan memerlukan analisis yang kompleks dan beragam, mencakup analisis filosofis, konseptual, sosiologis, dan historis (Stanley, 1985a; 1985b; Saxe, 1991; Wallen & Fraenkel, 1988).

TINJAUAN PUSTAKA

Berpikir Inkuiri-Reflektif

Berpikir inkuiri-reflektif pertama kali dikemukakan oleh Dewey dalam karyanya "*How We Think*" (1910) dan karya-karya lainnya (1938, 1964), yang oleh para ahli dipandang memuat dasar-dasar pemikirannya tentang filsafat eksperimentalisme-pragmatisme-progresivisme. Menurut Dewey, inkuiri adalah aktivitas berpikir untuk membuktikan apakah fakta atau kebenaran yang diyakini (*present*) teruji atau tidak; memiliki kaitan atau didukung oleh fakta-fakta lain (*truths*) atau tidak, sehingga dapat menginduksi atau membenarkan keyakinan yang sudah ada (1910:8-9). Inkuiri tidak terkait dengan pengetahuan (*knowledge*) melainkan dengan keyakinan (*belief*) atas fakta atau kebenaran. Inkuiri-reflektif "*as ground of belief...to confirm or to refute the suggested belief*" (h.8-10); dan "*belief...as to be a fitting designation for the outcome of inquiry*" (1938:7). Karenanya bagi Dewey, esensi berpikir adalah "*to maintain the state of doubt and to carry on systematic and protracted inquiry*" (1910:13).

Berpikir reflektif (*reflective thought*) atau sinonim dengan "*points to, tells of, betokens, prognosticates, represents, stands for, implies*" (h.8) adalah berpikir berdasarkan "pertimbangan aktif, persisten, dan cermat berdasarkan pijakan atau dukungan yang jelas atas setiap keyakinan atau

pengetahuan yang ada atau yang sudah diterima umum, untuk kemudian menarik simpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya secara tepat” (h.6). Berpikir reflektif mencakup tiga tahap: (1) **pra-reflektif**: *incomplete situation*, kesadaran atas situasi membingungkan, bermasalah, penuh teka-teki, atau kacau; (2) **proses-reflektif**: *a conjectural anticipation*, merumuskan dugaan atau tafsir sementara atas situasi tersebut; mengatribusi kemungkinan adanya efek atau konsekuensi; *a careful survey*: mengkaji, menelaah, mengeksplorasi, atau menganalisis semua pertimbangan yang dicapai untuk memperoleh kejelasan dan klarifikasi masalah yang dihadapi; (3) **post-reflektif**: *taking the projected hypothesis*, membuat simpulan, keputusan projektif atas situasi yang sudah diklarifikasi, dipadukan, atau dipecahkan (1910:9, 106-107; 1964:150).

Dalam pandangan Dewey, inkuiri-reflektif adalah *“thought in its eulogistic and emphatic sense”* (1910:5), memadukan atau mengaitkan antara *“reasoned thinking”* atas *“the object seen”* dan *“the object suggested”* (h.7-8). Ia tidak identik dengan cara berpikir ilmuwan yang bersifat sekuensial, dan mensugesti simpulan untuk diterima begitu. Ia bersifat konsekutif, tidak begitu saja menerima simpulan atau keyakinan apa adanya tanpa mengkaji konsekuensinya atau mengkajinya kembali dari awal. Karenanya, inkuiri-reflektif sangat cocok dengan sikap alamiah peserta didik yang selalu ingin tahu, senang berimajinasi, dan ingin selalu mencoba, sebagai sikap yang *“is near, very near, to the attitude of the scientific mind”* (h.iii).

Sesuai dengan esensi berpikir inkuiri-reflektif, konten (*subject matter*) inkuiri reflektif bukan konsep dan generalisasi yang dirumuskan, dikristalisasi, dan disistematisasi oleh pakar atau disiplin ilmu yang hanya akan melahirkan pribadi ‘mekanik dan membatasi kekuatan intelektual’. Konten inkuiri reflektif adalah ‘masalah’ (*problem*), yaitu “apapun yang problematik, menantang pikiran atau menimbulkan ketidakpastian dalam keyakinan” (1910:9). Masalah inilah yang akan melindungi semangat inkuiri, menghindari kebosanan, rutinitas, dan dogmatisme; meningkatkan fleksibilitas, kewaspadaan, dan rasa ingin tahu sebagai esensi belajar sebagai latihan

berpikir. Problem atau masalah tersebut tidak dipilih atau ditentukan oleh pakar atau disiplin ilmu, melainkan dipilih dan ditentukan sendiri oleh peserta didik berdasarkan kebutuhan, kapasitas, dan refleksi dari pengalaman mereka atas ‘situasi atau fenomena sosial yang problematik, bermasalah, penuh teka-teki atau ketidakpastian yang relevan dengan problem atau masalah nyata dalam kehidupan bersama” (1964:150) atau *“carried directly in the matrix of social intercourse”* (h.141)

Secara pedagogik, belajar melalui problem atau masalah, di satu sisi, lebih sederhana daripada belajar melalui sajian tentang tubuh disiplin ilmu secara teknis atau bentuk-bentuk manipulasi fisik lainnya, karena dengan demikian mereka hanya belajar tentang ikhwal kemanusiaan sebagai objek terisolasi dan tidak realistis. Sementara, belajar adalah bagaimana mengaitkan dan mendekatkan mereka dengan beragam modus tindakan manusia yang nyata (1964:219). *“We only think when we are confronted with a problem..The way of effective thinking when a problem arises”* (1910:199). Karenanya, kebutuhan untuk menemukan solusi atas situasi atau fenomena sosial yang problematik, bermasalah, penuh teka-teki atau ketidakpastian merupakan *“the steadying and guiding factor in the entire process of reflection”* (h.11), dan *“ideas are not then genuine ideas unless they are tools in a reflective examination which tends to solve a problem”* (h.109).

Inkuiri-Reflektif dalam PIPS: Perkembangan di Dunia

Inkuiri-reflektif dalam PIPS di dunia akan dilacak dari evolusi sosio-historis di Amerika sebagai salah satu pusat unggulan dalam pengembangan paradigma PIPS. Menurut para ahli, PIPS di Amerika berkembang dan menjadi bagian dari kurikulum sekolah sejak 1880an, ketika Amerika mendirikan *“American public schools”* secara besar-besaran, gagasan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum persekolahan dengan nama *“Social Education”*, dan kemudian diganti *“Social Studies”* sejak terbentuknya organisasi profesional PIPS, *Committee on Social Studies (CSS)* (1913) (Saxe, 1991).

Inkuiri-reflektif dalam PIPS diartikan sebagai "proses pengambilan keputusan dalam konteks sosio-politik; identifikasi masalah; melakukan telaah untuk memperoleh jawaban yang memuaskan; dan mengkaji masalah-masalah sosial sebagai realitas di dalam kehidupan personal dan kolektif". Pengertian tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran Dewey, yang dianggap para pakar sebagai antitesis atau teori kritis atas pemikiran dan praktik PIPS tradisional. Sebagai paradigma PIPS, inkuiri-reflektif dikembangkan dan digunakan pertama kali sejak periode awal CSS (1913-1916) yang dalam historiografi dikenal sebagai peletak dasar "*the inaugural social studies program*" melalui kontribusi besar dari pemikiran para "*the Old Master*" dan "*founders of social studies*" seperti Dewey, Jones, Dunn, Barnard, Robinson, Kingsley, Mace dan Snedden (Saxe, 1991:178). Waktu itu, inkuiri-reflektif dikembangkan mulai kelas XII, dengan fokus kajian pada "*community civics*" dan "*problems of democracy*" dalam bidang ekonomi, sosial dan politik (Hunt & Metcalf, 1955:191; Massialas & Cox, 1966:28; Saxe, 1991:207).

Setelah CSS diubah menjadi NCSS (1921) hingga awal periode 1950an, inkuiri-reflektif diganti dengan paradigma ilmu-ilmu sosial. Pada medio 1950an, inkuiri-reflektif kembali dikemukakan oleh Hunt and Metcalf (1955) dengan visi baru terkait dengan konten PIPS. Menurut keduanya, konten PIPS inkuiri-reflektif tidak harus bersumber dari struktur disiplin ilmu yang ditetapkan oleh pakar. Konten PIPS dapat berupa isu, masalah atau problem nyata di dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di "*closed area*". Visi baru Hunt and Metcalf ini merupakan ikhtiar untuk melakukan gerakan "*Back to Basics*" pada pemikiran asli Dewey tentang inkuiri-reflektif, dan tentang masalah/persoalan nyata demokrasi (Stanley, 1985b). Visi Hunt and Metcalf ini didukung oleh Engle (1960), dan dianggap sebagai "*usher in the new social studies movement*" (Saxe, 1991: xiv).

Pada periode 1960an, akibat kekalahan Amerika dari Uni Soviet dalam pengembangan program ruang angkasa, muncul gerakan "*The New Social Studies*" yang kembali menggunakan paradigma ilmu-ilmu sosial. Pada periode ini pula diidentifikasi konsep-konsep dasar dan

generalisasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai konten PIPS, dan dikembangkan lebih dari 50an projek kurikulum berbasis ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, pada periode 1970an, terjadi perdebatan di kalangan pakar terkait dengan paradigma PIPS. Sebagian pakar memandang bahwa PIPS tetap dikembangkan atas dasar paradigma ilmu-ilmu sosial. Proponen pandangan ini antara lain Wesley, Wronski, Schwab, Peters dan Hirst. Sebagian pakar lainnya (majoritas) memandang bahwa PIPS perlu dikembangkan atas dasar paradigma inkuiri-reflektif, dengan orientasi pada pengembangan kompetensi pemecahan masalah atau metode reflektif; klarifikasi nilai; tindakan sosial; pengembangan moral; analisis kebijakan sosial dan politik; pelibatan sosial-politik; dan kritisisme sosial. Proponen pandangan ini antara lain Brubaker, Simon, Williams, Metcalf, Hunt, Massialas, Cox, Lockwood, Simon, Rath, Harmin, Newmann, Kohlberg, Engle (Barr et al., 1977; Stanley, 1985b). Dari kedua kelompok pemikiran tersebut, NCSS menyepakati penggunaan paradigma inkuiri-reflektif Deweyan dengan orientasi pada pengembangan 'tindakan sosial' dan 'partisipasi sosial' (*social participation is a necessary and essential component of modern-day social studies programs*) dari Simon, Rath, Harmin, dan Newmann (Jarolimek, 1977:15).

Gerakan "*returning to the basics*" ke paradigma inkuiri-reflektif pada periode 1970an dilatarbelakangi oleh kegagalan reformasi PIPS dari gerakan *the New Social Studies* 1960an dengan pemikiran struktur disiplin Bruner, dan mengikhtikarkan untuk Pada tahun 1980an gerakan tersebut mendapat respon yang semakin kuat dari pakar dan pengembang program PIPS, dan berpuncak pada lahirnya gerakan yang dalam historiografi PIPS dikenal sebagai gerakan "*the Old Master*" dan "*founders of social studies*" tentang inkuiri-reflektif dan '*rekonstruksionisme sosial*' (Lee, 2000:12; Saxe, 1991:178). Tampaknya, gerakan ini juga memperoleh momentum penting dengan munculnya pemikiran baru yang revolusioner tentang logika penemuan ilmu dari Kuhn (1970) yang menentang pemikiran '*logico-deductivo, mainstream* ala Aristotelian, Hegelian, Baconian, atau Popperian (Banks, 1995). Sejumlah proponen gerakan ini antara lain Engle; Ross, Robinson, Thorntorn, Mathison, Crook, Berkowitz,

Nehring, Adler, Johnson, Newmann, Hursh (Ross, 1985; 1986; 1994); Evan, dan Saxe (1991).

Sejak 1970an hingga konseptualisasi NCSS 2010, inkuiri-reflektif tetap menjadi paradigma utama di dalam pengembangan IPS, dengan memasukkan pemikiran-pemikiran terbaik dari paradigma-paradigma yang lain seperti kewarganegaraan dan ilmu-ilmu sosial. Perbedaan yang ada, lebih terletak pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Di dalam dokumen NCSS 1984 tujuan PIPS adalah *'criticism and social participation'* melalui pengembangan keterampilan berpikir reflektif, pemecahan masalah, dan keterampilan membuat keputusan rasional sebagai dasar bagi peserta didik *'for the purpose of creating involvement in social action'* (Sunal & Haas, 1993:7). Dalam dokumen 1992 dan 1993, tujuan PIPS adalah *"promotes knowledge of and involvement in civic affairs, to help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world"* melalui pengembangan keterampilan mengumpulkan data, intelektual, membuat keputusan, dan keterampilan personal terkait dengan isu-isu sosial kritis dalam masyarakat (NCSS, 1992, 1993:213). Dalam dokumen tahun 1994, tujuan PIPS adalah *"help students construct a knowledge"* sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan partisipasi mereka di dalam masyarakat demokrasi, berdasarkan cara-cara spesifik dari masing-masing disiplin ilmu di dalam memandang realitas (NCSS, 1994:4) Tujuan ini dirumuskan sejalan dengan penerimaan luas atas teori konstruktivisme personal Piagetian dan sosial-budaya Vygotskian sejak medio 1980an, didukung oleh banyaknya hasil-hasil penelitian empirik dalam beragam konteks, di kalangan komunitas PIPS dunia. Akhirnya, di dalam dokumen NCSS 2010, kembali ditegaskan bahwa tujuan PIPS adalah *"to help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world"* (NCSS, 2010:3).

Dengan demikian tujuan akhir PIPS berdasarkan paradigma inkuiri-reflektif adalah mendidik peserta didik menjadi warga negara yang *'cerdas'* atau "kecerdasan warga negara" (*civic intelligence*). Yakni warga negara yang *"a*

well-informed and civic-minded citizenry that can sustain and build on democratic traditions"; memiliki kemampuan "melakukan inkuiri, berpikir kritis, membuat pertimbangan dan keputusan atas isu dan masalah publik beserta implikasinya, dan berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang menuntut berpikir kritis" (Pace, 2007:26-27; NCSS, 2010); atau *"a critical thinker"*, *"an authentic decision-making situation"* (Lee, 2000:4); atau *"good problem solvers and wise decision makers"* (Lindquist, 1995:1, 8-11). Atribut-atribut kecerdasan warga negara ini merupakan *"a disciplined mind"* positif dan konstruktif yang memungkinkan seseorang mampu melakukan inisiatif intelektual sekaligus mengontrol hasilnya secara independen tanpa pengaruh eksternal (Dewey, 1910:63). Tujuan-tujuan tersebut di kalangan pakar PIPS dipandang sebagai *"the heart of democratic citizenship"* (Stanley, 1985b), atau *"the key defining aspects of social studies"* (NCSS, 1993:213) dalam paradigma inkuiri-reflektif. Menurut pandangan Banks (1995; 2009) dan Lee (2000) paradigma inkuiri-reflektif merupakan paradigma terakhir dalam PIPS yang bertujuan membentuk karakter "warga negara atau kewarganegaraan transformatif" (*transformative citizenship*) yang mampu beradaptasi dan berpartisipasi aktif di dalam keberagaman masyarakat dan globalisasi.

Tiga Perspektif Inkuiri-Reflektif

Dinamika pemikiran di kalangan komunitas pakar PIPS sejak periode CSS hingga NCSS sebagaimana dikemukakan di atas, juga memperlihatkan adanya tiga perspektif berbeda terkait dengan konten dan prosedur berpikir inkuiri-reflektif.

Kelompok pertama memandang bahwa konten PIPS adalah peristiwa atau masalah publik yang penting dan signifikan yang dipilih, diklasifikasikan dan ditetapkan secara ilmiah para pakar disiplin ilmu. Prosedur berpikirnya juga mengikuti prosedur atau pemikiran inkuiri *'mainstream'* dari para pakar atau struktur disiplin keilmuan. Diantaranya adalah *"the great social dilemmas"* yang dihadapi masyarakat dan bangsa pada periode tertentu, yang dapat dikaji secara disiplin ilmu; *"historical problems"* seperti revolusi Perancis, perang sipil Amerika yang dapat dikaji

dari perspektif ilmu sejarah; *"problems of maximizing production"* yang bisa dikaji dari konsep-konsep ekonomi; atau persoalan *"the rights of citizens"* terkait dengan konflik tentang makna kebebasan, kesetaraan, keadilan, keamanan atau kesejahteraan publik yang dapat dikaji dari disiplin ilmu politik (Massialas & Cox, 1966:51-52). Pandangan kelompok ini dikemukakan diantaranya oleh Engle, Oliver, Hulfish, Smith, Crabtree, Beyer, Philip, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Bruner tentang *"process of education"* (Massialas & Cox, 1966:40; Ross, 1985; Vinson & Ross, 2001). Menurut Bruner (1978) intelektualitas atau cara-cara manusia membangun pengetahuan *"sama atau paralel"* bagi semua orang, tak pandang usia—tak terkecuali pada anak dan ilmuwan. Berdasarkan asumsi itu, Bruner kemudian mengajukan proposisi bahwa *"the foundations of any subject may be taught anybody at any age in some [regardless of their age]"* (h.12). Argumentasi ini pula yang digunakan oleh Wesley dengan menyatakan, bahwa apapun konten PIPS yang direorganisasi, disederhanakan, dan dipilih secara purposif dari konten IIS, *"it is sharply delimited by the interests, capacities, maturation, and needs of the students"* (Wesley, 1950:58).

Kelompok kedua, sebaliknya memandang bahwa konten kajian PIPS yang merupakan simplifikasi dari konten ilmu-ilmu sosial untuk tujuan berpikir kritis-reflektif merupakan *"the traditional concept of content"* yang didasarkan pada teori belajar asosionis, yang lebih menekankan pada memorisasi sederhana pengetahuan/pengalaman secara akumulatif dan kurang mampu mendidik mereka untuk berpikir kritis-reflektif. Selain itu, konten seperti itu juga lebih banyak berkaitan dengan hukum-hukum individual dan perilaku sosial, yang sudah tidak relevan lagi dengan kecenderungan baru dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial yang berpusat pada *"man himself"* dalam perspektif antropologi budaya, sosiologi, psikologi, dan psikiater (Hunt & Metcalf, 1955:193). Bagi kelompok ini, konten inkuiri-reflektif dalam PIPS adalah terdiri-dari peristiwa atau masalah publik yang dianggap penting dan signifikan, "bersumber langsung dari realitas kehidupan nyata yang sangat kompleks, yang tidak mudah diklasifikasikan secara

keilmuan, serta tidak ditemukan di dalam struktur konten keilmuan" (Ross, 1985:17).

Peristiwa atau masalah publik dapat berupa isu-isu kontroversial (Massialas & Cox, 1966:52; Parker, 1991); isu-isu nilai dan moral di *"closed areas"* dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama yang bersifat lintas keilmuan (Hunt & Metcalf, 1955); atau isu dan masalah ras, budaya dan etnik (Banks, 1984; 2006). Pemilihan konten juga diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik, sesuai dengan keberagaman pemikiran, minat, kesadaran, nilai personal dan/atau kelompok sosial-budaya mereka (Barr et al., 1977:66). Terpenting, masalah sebagai konten PIPS dapat menyediakan peserta didik kesempatan untuk *"make a connection"* antara rutinitas keseharian yang mereka alami secara langsung dengan kompleksitas isu di sekolah dan di masyarakat (Ross & Hannay, 1986:16); dan *"given act of thought occurs, every thing a thinkers brings to bear on a problem"* (Hunt & Metcalf, 1955:214). Atau atau seperti dikatakan Dewey konten *"are tools in a reflective examination which tends to solve a problem"* (1910:109). Prosedur berpikir inkuiri-reflektif juga tidak mengikuti pemikiran 'mainstream', melainkan mengikuti prosedur atau pemikiran 'transformative' sesuai dengan keberagaman konteks pemikiran, kesadaran, nilai personal dan/atau kelompok sosial-budaya tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Dewey (Banks, 1995; 2009; Hunt & Metcalf, 1955).

Pandangan kelompok ini dikemukakan diantaranya oleh Hunt & Metcalf (1955); Cornbelth (1985); Banks (1995; 2009); Milss, Bernstein, Cherryholmes, Ross, dan Hannay (Ross, 1985; 1994; Ross & Hannay, 1986). Menurut kelompok ini, pandangan ini lebih *"ecological niche"* dengan teori berpikir inkuiri-reflektif Deweyan yang menekankan pada *"critical spirit"* atau *"reflective skepticism"* (Cornbelth, 1985:8-9). Selain itu, jika masalah dan prosedur inkuiri-reflektif hanya merupakan resital problema dan solusi siap-pakai produk para pakar atau disiplin ilmu, ia dianggap tidak merepresentasikan *"a significant departure from the recital of stories and arbitrary associations of the [inquiry] tradition...[and] no genuine climate of inquiry is present and students are afforded very little opportunity to be engaged in the task of*

seeking acceptable solution" (Massialas & Cox, 1966:90).

Kelompok ketiga diwakili oleh pandangan NCSS yang mengintegrasikan kedua pandangan di atas. Di dalam dokumen NCSS 1984, konten IPS bersumber dari "ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya" yang memiliki kaitan substantif dengan realitas kehidupan masyarakat dan merefleksikan "pengalaman personal, sosial, dan budaya siswa" (Sunal & Hass, 1993:7). Didalam dokumen 1993, terkait dengan visi PIPS "powerful", ditegaskan bahwa "Social studies is powerful when it is challenging". "Menantang" dalam visi tersebut bermakna bahwa PIPS mengintegrasikan antara konten keilmuan (*the diversity of disciplines it comprised*) dan konten yang diminati dan menarik perhatian peserta didik (*brings the controversial and ethical dimensions*) (NCSS, 1993:213). Prosedur berpikir yang digunakan dan dikembangkan juga merupakan integrasi antara "thinking creatively, critically, and productively" dengan memberi kesempatan luas kepada mereka melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, serta merumuskan berbagai alternatif pemecahannya; dan "ensuring equal access and opportunity" bagi setiap anak untuk mempraktikkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tuntutan prosedur keilmuan (h.19-22). Dengan kata lain, selain konten dan prosedur keilmuan, pengembangan berpikir inkuiri-reflektif dalam PIPS juga mempertimbangkan "how it is developed through student's activities" dan "focus students' attention on the most important ideas embedded in what they are learning" (NCSS, 1993:213).

Di dalam dokumen NCSS 1994 juga ditegaskan bahwa untuk membantu peserta didik mengkonstruksi pengetahuan, prosedur berpikir yang perlu dikembangkan adalah sinergi antara "academic disciplines as specialized ways of viewing reality" dengan "student's experience concepts reflectively and actively" agar pemahaman dan pengertian anak terhadap fenomena menjadi lebih lengkap (h.4-5). Konfigurasi dua modus pembentukan pengetahuan ini, sejalan dengan teori konstruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan hakikatnya adalah "grows as a direct result of individual construction" (h.5).

METODE

Studi ini mengkaji dan mendeskripsikan dinamika inkuiri-reflektif yang terdapat di dalam sumber primer: (1) naskah-naskah atau karya-karya ilmiah tertulis (makalah, artikel buku, tesis dan/atau disertasi) dari pakar PIPS lainnya terkait dengan gagasan dan pemikiran tentang pengembangan inkuiri-reflektif dalam PIPS; dan (2) dokumen kurikulum PIPS-SD 1947—2013. Data berupa "teks-teks" atau "narasi tekstual" (kata, frase, kalimat, atau paragraf) sebagai kesatuan wacana yang sudah pasti/baku (*fix*), dimana arti atau maknanya bersifat konstitutif di dalam tulisan itu sendiri (Ricoeur, 1991:106) yang terdapat di dalam sumber primer.

Data dikumpulkan dan dipilih menggunakan teknik 'purposively selected texts sampling' (Zhang & Wildemuth, 2009); dan dianalisis dengan teknik 'analisis konten kualitatif' (*qualitative content analysis*) secara kualitatif (Holsti, 1969; Stemler, 2012) menggunakan prosedur analisis "reflektif-interpretif" berupa "written reflective exercises", "reflective notes", dan "interpretive memos" (Miles & Huberman, 1992; Zhang & Wildemuth, 2009). Analisis difokuskan pada tiga persoalan pokok menurut model analisis Barr et.al. (1977; 1978) yakni: (1) apa konsepsi dan kompetensi inkuiri-reflektif kewarganegaraan yang perlu dicapai (*tujuan*); (2) apa dan bagaimana cara/pendekatan yang perlu dilakukan (*metode*); dan (3) apa hal-hal bermakna yang perlu diberikan dan dalam bentuk apa (*konten*) agar konsepsi dan kompetensi kewarganegaraan tersebut bisa dicapai dan ditingkatkan? Secara metodologis, studi ini merupakan sebuah "philosophical inquiry" (Fullinwider, 1991) yang mengkaji apa dan bagaimana konstruksi dasar pemikiran komunitas dan kurikulum PIPS tentang tiga persoalan filosofis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkuiri-Reflektif dalam Konseptualisasi PIPS

Di Indonesia, inkuiri reflektif pertama kali didiskusikan dan disepakati sebagai paradigma PIPS di Indonesia di dalam Seminar Nasional *Civics Education* di Tawangmangu Solo tahun 1971. Waktu itu, paradigma PIPS inkuiri reflektif

didefinisikan secara konseptual sebagai “studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan *interdisipliner*, dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa” (Winataputra, 2011:11). Dari rumusan tersebut, model inkuiri reflektif yang disepakati berpijak pada pemikiran kelompok pertama, yang memandang bahwa konten dan prosedur ‘*mainstream*’ dari para pakar atau struktur disiplin keilmuan. Sejak organisasi profesional PIPS (HISPIPSI) dibentuk tahun 1991, paradigma inkuiri-reflektif diganti dengan paradigma ilmu-ilmu sosial. PIPS kemudian dikonseptualisasi sebagai “*penyederhanaan* disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan” (Somantri, 2001:92). Sebuah definisi konseptual yang diadaptasi dari definisi *social studies* Wesley (1950).

Menurut sejumlah pakar, definisi konseptual tersebut dikembangkan atas dasar paradigma “ilmu-ilmu sosial” (*social studies taught as social sciences*) (Barr et al., 1977:61-63; 1978:85-111). Studi Saxe (1991:21-22) menunjukkan bahwa definisi konseptual Wesley dan HISPIPSI/HISPIPI tersebut merupakan rekonseptualisasi dari paradigma pertama IPS yang dirumuskan pada periode paling awal pengembangannya, yakni pada tahun 1880-1890an. Waktu itu dokumen *the National Herbart Society papers of 1896-1897* mengkonseptualisasi PIPS sebagai “*delimiting social sciences for pedagogical use*”. Konseptualisasi ini tetap digunakan pada periode CSS (1913-1916) dengan pengertian sebagai ikhtiar akademik untuk memanfaatkan bahan-bahan dari ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, atau dalam istilah James sebagai “*a type of curricular approach to social science in schools*”. Tujuan PIPS bukan pada penguasaan struktur disiplin ilmu, melainkan untuk transmisi kewarganegaraan (*to be socialized, to be acculturated, to be enculturated*) dan inkuiri-reflektif (*a means of reconstructing society*) (Saxe, 1991:16-27). Sejak tahun 1960an, sejalan dengan pengembangan PIPS sebagai disiplin baru yang terintegrasi definisi konseptual tersebut sudah tidak digunakan lagi di kalangan komunitas PIPS dunia.

Karenanya, yang menjadi pertanyaan, mengapa definisi konseptual tersebut masih tetap digunakan hingga sekarang sebagai ‘*position paper*’ dan ‘*shared paradigm*’ setidaknya di kalangan komunitas profesional PIPS Indonesia yang tergabung di dalam HISPIPSI/HISPIPI. Dalam kaitan ini Somantri (2001:43) berargumen bahwa definisi konseptual tersebut merupakan ‘jalan tengah’ untuk menjembatani antara kepentingan ilmuwan sosial dan ilmuwan pendidikan. Alasan yang juga sama dikemukakan oleh Wesley atas definisi konseptual yang diajukan. Pada saat itu, mungkin argumen tersebut bisa diterima. Namun, sejalan dengan dinamika baru dalam perkembangan PIPS yang sudah mengarah pada sebuah ‘disiplin baru’ yang oleh Somantri disebut ‘*synthetic discipline*’ yang Ia pandang sangat potensial untuk menjadi unggulan dan andalan intitusi pembina (2001:112), maka argumen tersebut tidak bisa dipertahankan lagi.

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan secara mandiri, komunitas PIPS seharusnya lebih fokus pada pengembangan paradigma PIPS sebagai disiplin ilmu, dan tidak lagi terjebak dalam dikotomi atau tarik-ulur antara ilmuwan sosial dan ilmuwan PIPS. Karena sesungguhnya, ilmu-ilmu sosial hanyalah merupakan salah satu sumber darimana konten PIPS berasal. Ditegaskan oleh Becker (1965), “*Efforts are being made to establish social studies as a discipline intellectually autonomous from the social sciences*” (h.319). McCutcheon (2001) juga berpendapat bahwa PIPS adalah disiplin ilmu, karenanya “*the existence of a discipline can weld separate elements of subject matter into a single field which will have its own integrity*” (h.230).

Dalam hal ini, tampak bahwa pengembangan paradigma PIPS sebagai ‘*synthetic discipline*’ mengalami “*stagnasi*”. Hingga saat ini, belum ada ikhtiar akademis dari komunitas IPS untuk melakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi paradigma PIPS yang dapat dijadikan ‘*shared paradigm*’ yang sejalan dengan dinamika baru yang terjadi di tingkat internasional. Jika mengikuti pandangan Kuhn (1970), PIPS sebagai disiplin ilmu tidak statis, apalagi stagnan. Ilmu adalah dinamis, kompleks, dan perlu dilakukan perubahan berkelanjutan, “*...that scientific revolutions are here taken to be those non-*

cumulative developmental episodes" (h.92). Karenanya, perubahan, reinterpretasi, rekonstruksi paradigma PIPS merupakan sebuah "keniscayaan akademik" sejalan dengan dinamika baru keilmuan.

Setidaknya, ada dua faktor penyebab 'stagnasi' dalam pengembangan paradigma inkuiri-reflektif PIPS di Indonesia, yakni kurangnya dukungan komunitas PIPS dan penelitian.

Pertama, dukungan komunitas PIPS. Menurut Somantri (2001), persoalan krusial terjadinya 'stagnasi' dalam pengembangan paradigma PIPS sebagai disiplin ilmu, banyak dipengaruhi oleh faktor komunitas PIPS sendiri, yang dalam epistemologi sosial Kuhn (1970) merupakan parameter utama "matang/mapan" atau "tidak"-nya PIPS sebuah disiplin ilmu. Menurut Somantri, komunitas PIPS masih terjebak dalam suasana '*the silent academic society*'. Mereka belum mampu menjadi '*the productive academic society*' yang dapat melahirkan pikiran dan karya terbaiknya" dalam PIPS. Di kalangan komunitas PIPS juga masih banyak yang belum menyadari bahwa PIPS adalah sebuah disiplin ilmu. Dialog, diskusi, dan debat akademik di kalangan komunitas PIPS secara berkesinambungan baik di lingkungan FPIPS maupun HISPIPSI juga hampir tidak berkembang, karena ada hambatan '*obstacle*' (masalah yang sudah menyangkut aspek mental-psikologis) seperti sifat-sifat *denial, repression, withdrawal, projection, regression, psychosomatic* (h.72). Dalam perspektif sosiologi ilmu Kuhnian, komunitas PIPS sebagai "*institusi sosial*" belum memiliki "*signifikansi sosiologis*" dalam proses kesinambungan dan perubahan konstruktif terhadap kehidupan dan tradisi ilmiah PIPS.

Somantri juga menengarai, keberadaan institusi sentral bagi pengembangan PIPS (fakultas, jurusan atau prodi) belum memiliki tradisi akademik universitas yang kuat (h.99). Bahkan, Ia menduga "*telah terjadi krisis*" di lingkungan institusi pembina PIPS dalam penguasaan isi/konten (konseptual dan sintaktikal), walaupun juga diakui hal itu belum sampai pada tahap "*quo vadis,*" karena sesungguhnya komunitas PIPS sudah memiliki jati-diri yang perlu terus diikhtirakan pengembangan dan pemantapannya (h.112, 214). Kompleksitas persoalan di tingkat komunitas ini Ia pandang

sebagai "titik kritis" dalam pengembangan PIPS yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ikhtiar akademik untuk meningkatkan komitmen akademik dan profesional mereka harus dijadikan agenda utama oleh komunitas profesional PIPS. Jika tidak, dikhawatirkan situasi ini dapat menciptakan kegamangan dan ketidakpastian di kalangan komunitas PIPS atas eksistensi profesi dan keilmuannya.

Kedua, dukungan penelitian tentang inkuiri-reflektif dalam PIPS. Disadari atau tidak, aspek lain yang juga kurang kontributif terhadap pengembangan paradigma inkuiri-reflektif di Indonesia adalah kurangnya dukungan penelitian empirik, dan jikapun ada, jumlahnya sangat sedikit. Studi yang bersifat meta-analisis atas hasil-hasil penelitian tentang pengembangan berpikir dalam PIPS pun tidak pernah dilakukan. Dari sejumlah penelitian yang bisa diakses, studi Noviani (2010) tentang *integrated learning* dipandang bisa memberikan gambaran yang agak utuh tentang teori, konten, prosedur, metode, dan konteks pembelajaran berpikir inkuiri-reflektif. Penelitian lain (Tjahjono & Aji, 2010; Sumarno, 2013; Widyasari, Soekamto & Wirahayu, 2013; Sari, Soekamto & Astina, 2013) teori berpikir inkuiri-reflektif yang digunakan sangat lemah, bahkan ada kesalahan konseptual, dan/atau sama sekali tidak menggunakan. Sementara penelitian Agustin (2014) kurang memperhatikan aspek-aspek teoretik terkait dengan relevansi atau konsistensi antara metode/model, media dan konten yang digunakan sesuai dengan dengan tujuan berpikir inkuiri-reflektif, baik berdasarkan kelompok pemikiran pertama atau kedua sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Metode/model atau media yang digunakan sudah sesuai, tetapi konten masih menggunakan konten-konten konvensional yang tidak reflektif, bukan isu, fenomena, problem atau masalah nyata atau sebaliknya.

Sejumlah studi lain (Darmawan, 2010; Fitriana, Wirahayu, & Purwanto, 2013; Jamil, 2000; Widyasari *et al.*, 2013; Sari, 2014; Sari *et al.*, 2013) tidak jelas apa isu, fenomena, problem atau masalah nyata yang dijadikan konten pembelajaran benar-benar relevan dengan proses dan tujuan berpikir inkuiri-reflektif. Sementara sejumlah penelitian lain (Darmadi, 2010; Jamil,

2000; Tjahjono & Aji, 2010; Agustin, 2014) juga cenderung menggunakan istilah 'prestasi/hasil belajar' (*learning achievement*) sebagai konsep umum, tanpa spesifik merujuk pada kompetensi berpikir inkuiri-reflektif. Instrumen penilaian hasil belajar yang dikembangkan juga tidak spesifik mengukur kompetensi berpikir inkuiri-reflektif. Sehingga, hasil penelitiannya pun bias, tidak fokus pada penguasaan kompetensi berpikir inkuiri-reflektif.

Dari seluruh penelitian yang dianalisis, kelemahan utamanya terletak pada lemahnya analisis, diskusi dan implikasi atas hasil-hasilnya, terutama dalam membangun kaitan secara terfokus pada pengembangan berpikir inkuiri-reflektif. Analisis dan diskusi umumnya terjebak dalam pemikiran kuantitatif persentase menggunakan rumus-rumus statistik sederhana (*mean*) yang kemudian dikonversi berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk menjustifikasi tingkat ketercapaiannya. Analisis kualitatif atas faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya juga tidak banyak disinggung atau dikaitkan dengan aspek, proses, konten, dan konteks berpikir inkuiri-reflektif itu sendiri. Sehingga, hasil-hasil studi tersebut secara empirik tidak banyak berkontribusi bagi konseptualisasi dan kontekstualisasi inkuiri-reflektif dalam PIPS pada tataran paradigmatik.

Sejumlah kelemahan dalam studi, selain karena persoalan penguasaan teori dan metodologi, juga terkait dengan belum adanya komitmen dan rumusan bersama atas paradigma penelitian tentang inkuiri-reflektif yang disepakati dan menjadi referensi bersama kalangan komunitas PIPS di Indonesia. Akibatnya, penelitian yang mereka lakukan lebih merupakan sebuah "*intellectual exercise*" yang tidak banyak berkontribusi terhadap dinamika dan pengembangan tubuh keilmuan inkuiri-reflektif dalam PIPS. Kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi pengembangan PIPS itu sendiri. Karena ikhtiar keilmuan yang mereka lakukan hanya menurut minat dan kebutuhan masing-masing, tanpa ada kesatuan '*organizing guidance atau principle*' yang semuanya ditetapkan oleh paradigma. Kesadaran bersama dari komunitas PIPS untuk mengikhtikarkan hal ini sangat diharapkan.

Sungguhpun demikian, hasil-hasil studi di atas menunjukkan bahwa berpikir inkuiri-reflektif potensial untuk dikembangkan dalam PIPS; dan dapat membuka wacana akademik yang lebih terbuka bagi komunitas PIPS (HISPIPI/HISPIPI) untuk melakukan konseptualisasi dan kontekstualisasi inkuiri-reflektif sebagai paradigma PIPS di Indonesia. Terpenting dari itu, hasil-hasil studi tersebut berbeda dengan hasil studi Somantri tahun 1978 (2001) yang menyimpulkan bahwa pengembangan berpikir inkuiri-reflektif terkait dengan konten yang bersumber dari bahan-bahan dan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat lebih tepat untuk program S-2 dan S-3 (h. 75-76, 198-199), dan tidak cocok untuk jenjang persekolahan (SD—SMA) "karena belum ada yang mengikuti, dan karena program dan penyelenggaraan Pendidikan IPS di sekolah masih sangat lemah" (h.44).

Inkuiri-Reflektif dalam Kurikulum Sekolah

Sejauh yang bisa dicermati, sejak awal HISPIPI/HISPIPI secara institusional tidak langsung terlibat dalam pengembangan paradigma kurikulum sekolah. Karenanya, sejak awal paradigma PIPS di tingkat komunitas (HISPIPI/HISPIPI) dan kurikulum sekolah dikembangkan melalui dua jalur yang berbeda, yakni jalur "*komunitas-profesional*" dan "*kebijakan kurikuler*". Pengembangan kurikulum PIPS di Indonesia masih sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur). Pengembangan kurikulum PIPS di Indonesia lebih didasarkan pada pemikiran, landasan teori, dan/atau keyakinan filosofis "personal" daripada didasarkan pada komitmen bersama yang telah dibangun di dalam HISPIPI/HISPIPI (Winataputra, 2011:10-11). Ini pula yang terjadi dalam pengembangan paradigma inkuiri-reflektif dalam kurikulum PIPS. Hal ini jauh berbeda dengan CSS dan NCSS yang sejak awal sudah *concern* dengan kontekstualisasi paradigma PIPS dalam pengembangan kurikulum persekolahan (Saxe, 1991; Vinson & Ross, 2001).

Secara historis, konseptualisasi PIPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan tahun 1960an berdasarkan pemikiran *social studies* dan *civic education* di Amerika dan Inggris (Somantri, 2001). Namun, sejak kurikulum sekolah tahun 1947, PIPS sudah diberikan sebagai bahan kajian terpisah, dan menjadi 'label' kurikulum sekolah pada tahun 1975. Di dalam kurikulum 1947 sesungguhnya sudah muncul gagasan untuk mengembangkan paradigma inkuiri-reflektif seperti dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dan panitia reformasi sistem pendidikan nasional. Sejumlah prinsip pembaharuan kurikulum seperti: pendidikan dan pengajaran sebagai alat pembangunan bangsa dan negara; dan prinsip belajar aktif, kreatif, dan produktif juga digunakan untuk mendukung pengembangan '*Konsep Sekolah Kerja*' dari Dewey tentang pendidikan progresif. Konten pendidikan mencakup bahan-bahan kajian yang fungsional, praktis, dan berguna bagi anak dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara pengembangan intelektual dengan pengembangan watak, budi pekerti manusia sebagai pribadi dan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Metode pendidikannya juga difokuskan pada pembelajaran berbasis inkuiri-reflektif model Dewey. Namun ikhtiar tersebut tidak berhasil karena tidak ada satupun konten yang dapat mendukung pengembangan inkuiri-intelektual atau "cara berpikir rasional". Bahan-bahan kajian PIPS (Pendidikan Kemasyarakatan) dimasukkan dalam kelompok/*Wardhana* "Perkembangan Moral" (Belen, 2010:35-52).

Di dalam kurikulum 1954, gagasan untuk mengembangkan keterampilan berpikir inkuiri-reflektif tidak lagi digunakan. Walaupun bahan PIPS (Pengetahuan Sosial) tetap memiliki keterkaitan dan memanfaatkan kehidupan keseharian peserta didik, namun secara paradigmatis lebih difokuskan pada paradigma ilmu-ilmu sosial dan transmisi kewarganegaraan. Tujuan PIPS adalah memberikan "pengetahuan dan pengertian dasar" keilmuan sosial, budaya, geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai dasar untuk membangun keinsyafan kewarganegaraan yang demokratis dan nasionalis, tetapi tidak *chauvinistic* (Hasan, 2010:55-57, 67). Kurikulum 1964 juga menyebutkan bahwa salah satu ciri manusia

sosialis Indonesia adalah memiliki "cara berpikir rasional" melalui pengembangan kecerdasan. Namun bahan-bahan kajiannya juga tidak dikembangkan secara konsisten dalam konteks berpikir inkuiri-reflektif. Di SD bahan kajian PIPS dikelompokkan dalam *wardhana* perkembangan moral (Belen, 2010:35,41). Di SMP PIPS (termasuk Civics) tidak dimasukkan dalam *wardhana* Cipta yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir, melainkan dimasukkan dalam "Kelompok Dasar" yang berorientasi pada pembentukan manusia sosialisme Indonesia, yakni warga negara yang cinta bangsa tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan. (Hasan, 2010:73-80). Untuk semua jurusan SMA, bahan kajian PIPS juga dimasukkan dalam *wardhana* "Kelompok Dasar" untuk tujuan-tujuan keilmuan, yakni "mempersiapkan para pelajar secara ilmiah untuk studi lanjut ke perguruan tinggi" (Somantrie, 2010:86-90).

Dalam kurikulum 1968 ditegaskan bahwa salah satu tujuan dan isi pendidikan adalah "mempertinggi kecerdasan". Namun, penjabarannya dalam tujuan dan isi kurikulum PIPS juga tidak dikembangkan berdasarkan paradigma inkuiri-reflektif. Pada jenjang SD PIPS menggunakan paradigma transmisi kewarganegaraan untuk bahan kajian Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics dalam kelompok "Pembinaan Jiwa Pancasila" (Belen, 2010:67-68). Pada jenjang SMP-SMA bahan kajian PIPS dimasukkan dalam kelompok 'Pembinaan Pengetahuan Dasar' yang menggunakan paradigma ilmu-ilmu sosial. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan berpikir intelektual-teoretis dan kemampuan berpikir rasional secara keilmuan sebagai dasar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Khusus untuk PKN dimasukkan dalam kelompok "Pembinaan Jiwa Pancasila" menggunakan paradigma transmisi kewarganegaraan dengan tujuan membentuk manusia sosialisme Indonesia (Hasan, 2010:79-89; Somantrie, 2010:103). Namun hal ini terlihat tidak konsisten jika dikaitkan dengan konteks dan didaktik/metodiknya yang mengharuskan pembelajaran dikembangkan berdasarkan "*experience-centered*" dengan pendekatan "*problem solving*" untuk membangkitkan, minat, daya kreasi

dan aktivitas anak didik (Somantrie, 2010:98-100) yang merupakan karakteristik paradigma inkuiri-reflektif.

Pada kurikulum 1975 kemungkinan bagi pengembangan paradigma inkuiri-reflektif juga sangat terbuka (Somantri, 2001:43). Tujuan pendidikannya untuk SD memuat dimensi-dimensi keterampilan berpikir inkuiri-reflektif seperti kritis, kreatif dan cerdas; kemampuan menelaah masalah-masalah kemasyarakatan secara ilmiah (Belen, 2010:155); untuk SMP memuat kemampuan berpikir komprehensif, analitik, evaluatif dan sintesis/mencipta (Hasan, 2010:111); dan untuk SMA memuat keterampilan memecahkan masalah sederhana secara sistematis menggunakan prinsip ilmu pengetahuan yang telah diketahui; mampu bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan; memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasional dan objektif dalam memecahkan persoalan (Somantrie, 2010:110-111). Metode pembelajaran yang digunakan juga sebenarnya berorientasi pada pengembangan inkuiri-reflektif seperti CBSA dan pendekatan inkuiri. Namun konten pendidikannya masih kental dengan muatan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berbasis disiplin ilmu tetapi kurang memuat problema sosial kemasyarakatan (Kepmendikbud No. 008C/U/1975) yang menjadi esensi inkuiri-reflektif. Secara struktural, PIPS juga dimasukkan dalam kelompok program Pendidikan Akademis yang berorientasi pada pemberian dasar-dasar pengetahuan keilmuan-teoretik, atau pada penguasaan struktur disiplin ilmu, yang menjadi karakteristik paradigma ilmu-ilmu sosial dalam PIPS.

Di dalam kurikulum 1984, tujuan PIPS juga merefleksikan adanya paradigma inkuiri-reflektif, yakni “mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif siswa dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya” (Hasan, 2010:128). Secara didaktik-metodik pembelajarannya juga mengadopsi teori Bruner melalui pendekatan keterampilan proses (*process skill approach*) untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan IPS (Belen, 2010:156; Hasan, 2010:124; Somantrie, 2010:163). Hanya saja keterampilan proses tersebut lebih dimaknai sebagai keterampilan proses-proses keilmuan, dengan substansi

pendidikan yang juga lebih berorientasi pada penguasaan struktur disiplin ilmu, dan memasukkan PIPS ke dalam kelompok Pendidikan Akademis. Namun, tampaknya kedua pendekatan tersebut disinyalir tidak terlaksana dengan baik di lapangan. Salah satunya disebabkan oleh pengertian tradisional tentang konten kurikulum (pengetahuan sebagai konten kurikulum), sementara ketrampilan memproses informasi tidak dianggap konten kurikulum dan juga tidak diajarkan pada peserta didik (Hasan, 2010:125).

Kondisi yang sama juga ditemukan pada kurikulum 1994 dan 1999. Tujuan pendidikan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang “cerdas, kreatif, dan produktif” dikembangkan melalui inkuiri-reflektif seperti CBSA dan pendekatan inkuiri untuk pengembangan sikap bertanggung jawab dalam belajar, mengemukakan pendapat, dan kemandirian dalam mengambil keputusan (Belen, 2010:103-104). Namun, PIPS SD-SMP secara paradigmatis tetap dikembangkan sejalan dengan paradigma ilmu-ilmu sosial, memberikan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) sebagai bekal untuk studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Hasan, 2010:143). Pada jenjang SMA, walaupun penguasaan struktur disiplin ilmu masih cukup kuat, pengembangan dimensi berpikir inkuiri-reflektif tampaknya juga diperhatikan. Melalui bahan-bahan kajian ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan tata negara juga dikembangkan kemampuan memahami dan memecahkan masalah-masalah, serta mengambil keputusan secara rasional, kritis dan objektif dalam rangka pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Somantrie, 2010:187-190).

Di dalam kurikulum (KBK) 2004, ruang bagi pengembangan kompetensi inkuiri-reflektif sangat luas dan terbuka. Di dalam tujuan, visi, dan pengembangan dan pelaksanaan, dan prosedur pembelajarannya sarat dengan dimensi-dimensi substantif paradigma PIPS inkuiri-reflektif seperti “berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, lateral, metakognitif, dan mandiri; mampu melakukan inkuiri dalam memecahkan masalah; mampu melakukan refleksi atas pengalamannya untuk membangun pengetahuannya sendiri; dan

berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global. Semua itu dimaksudkan dalam rangka membentuk karakter warganegara dengan keunggulan kompetitif dan komparatif, dan memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan (Hasan, 2010:153-156; Belen, 2010:110; Somantrie, 2010:200-202). Namun, lagi-lagi di dalamnya penjabaran lebih lanjut memperlihatkan adanya '*inkonsistensi paradigmatis*' di dalam rumusan kompetensi dan konten kurikulum untuk semua jenjang kelas dan pendidikan. Orientasi pada konten dan kompetensi keilmuan (esensialisme) masih sangat kuat, sehingga secara teoretik dipandang 'mengherankan', karena umumnya KBK tidak mendasarkan diri pada pendidikan disiplin ilmu (Hasan, 2010:159).

Di dalam kurikulum (KTSP) 2006, PIPS dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan kompetensi keilmuan dan teknologi (PP. No.19/2005). SNP-IPS yang dikembangkan juga memasukkan unsur kompetensi inkuiri-reflektif seperti "kebiasaan atau budaya berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri" untuk semua jenjang pendidikan SD/SMP/SMA atau yang sederajat. Kompetensi SNP-PIPS tersebut juga ditetapkan sebagai SKL untuk semua jenjang pendidikan SD/SMP/SMA atau yang sederajat (Permendiknas No. 23/2006); dan selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu tujuan PIPS dalam bentuk "kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial", dan "kemampuan analisis kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis." Namun, penjabaran lebih lanjut tujuan inkuiri-reflektif tersebut ke dalam kompetensi-kompetensi dasar PIPS juga sama sekali tidak ditemukan (Permendiknas No. 22/2006).

Akhirnya, inkonsistensi yang sama juga ditemukan di dalam Kurikulum 2013. Di satu sisi, secara paradigmatis kurikulum 2013 menuntut penyempurnaan pola pikir pembelajaran dari 'pembelajaran pasif' menjadi 'pembelajaran aktif-mencari diperkuat dengan model pembelajaran

pendekatan sains'; dan 'pembelajaran kritis'. Kompetensi inkuiri-reflektif juga dikembangkan mulai kelas V-VI SD/MI/SDLB/Paket A, seperti kompetensi "menyajikan pengetahuan faktual" (KI-keterampilan); "menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu" (KI-pengetahuan); dan "berpartisipasi penanggulangan permasalahan lingkungan hidup" (KI-sikap sosial) (Permendikbud No.67/2013). Di sisi lain, kurikulum 2013, sama sekali tidak mencantumkan tujuan terkait inkuiri-reflektif untuk semua jenjang kelas dan pendidikan. Kompetensi-kompetensi inkuiri-reflektif juga tidak ditemukan untuk jenjang SLTP-SMA atau sederajat, melainkan kompetensi keilmuan (mis. berpikir logis dan prosedural sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan) dalam memecahkan masalah. Dalam standar isi PIPS pada jenjang SD—SMP atau yang sederajat, juga tidak disebutkan sama sekali kompetensi-kompetensi terkait dengan inkuiri-reflektif, melainkan kompetensi-kompetensi keilmuan dan transmisi budaya. Konten IPS pun hanya memuat tema-tema sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi, dan sama sekali tidak memuat isu, masalah, problem yang sesungguhnya menjadi konten utama dalam paradigma inkuiri-reflektif (Permendikbud No. 64/2013). SKL untuk semua jenjang kelas dan pendidikan ada disebutkan tentang keterampilan berpikir, namun tak satupun terkait dengan berpikir inkuiri-reflektif (Permendikbud No. 54/2013).

Hasil analisis kurikulum PIPS 1947—2013 di atas menunjukkan bahwa walaupun konseptualisasi warga negara cerdas cenderung pada aspek penguasaan struktur substantif dan sintaktik disiplin keilmuan, namun pada sejumlah kurikulum sesungguhnya ada ruang untuk melakukan elaborasi konseptual atas makna warga negara cerdas dalam perspektif paradigma inkuiri-reflektif. Namun hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengembangan inkuiri-reflektif ke dalam struktur kajian, tujuan/kompetensi, substansi, dan metode kurikulum tidak konsisten, tidak utuh, dan terjadi diskontinuitas atau disharmonisasi antara ide pendidikan yang terdapat di dalam UUD 1945, TAP MPR, UU Sisdiknas, dan kebijakan kurikulum (Hasan, 2010:141). UUD 1945 menyatakan salah satu tujuan nasional adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam rangka membentuk

karakter warga negara demokratis serta bertanggung jawab untuk membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Selain itu, penjabaran lebih jauh kata 'cerdas' (*intelligence*) dalam konteks berpikir inkuiri-reflektif ke dalam tujuan kurikuler pendidikan SD-SMA sejak 1947 hingga 2013, hanya ditemukan pada UU. No. 20/2003 dengan makna "berilmu, dan kreatif"; dan TAP MPR nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dengan makna "cerdas, kreatif, dan produktif," dan dalam ketentuan lain cenderung dimaknai "menguasai dasar-dasar pengetahuan, *theoretisch*" (UU. No. 4/1950; UU. No. 12/1954); "memiliki pengetahuan dasar" (UU. No. 2/1989). Realitas ini menunjukkan bahwa paradigma kurikulum PIPS di Indonesia belum konsisten memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir inkuiri-reflektif secara utuh seperti kemampuan berpikir rasional, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, mengembangkan gagasan kompleks secara komprehensif, belajar secara cepat, dan/atau belajar dari pengalaman.

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan, *Pertama*: pengembangan paradigma inkuiri-reflektif di tingkat komunitas PIPS masih merupakan wacana akademik, dan belum menjadi konsensus atau komitmen bersama. Bahkan, ada indikasi kuat pengembangan paradigma inkuiri-reflektif PIPS di Indonesia mengalami 'stagnasi'. Dua faktor penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya dukungan komunitas PIPS dan hasil-hasil penelitian. *Kedua*, paradigma kurikulum PIPS di Indonesia juga belum konsisten memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir inkuiri-reflektif secara utuh seperti kemampuan berpikir rasional, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, mengembangkan gagasan kompleks secara komprehensif, belajar secara cepat, dan/atau belajar dari pengalaman.

Berdasarkan hasil penelitian ini, merupakan keniscayaan akademik bagi komunitas IPS untuk melakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi paradigma PIPS yang dapat dijadikan '*shared paradigm*' yang sejalan dengan dinamika baru

yang terjadi di tingkat internasional, yakni pengembangan kewarganegaraan yang transformatif yang salah satunya dicirikan oleh kemampuan berpikir inkuiri-reflektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, V. (2014). *Peningkatan Aktivitas Pembelajaran dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS dengan Menggunakan Metode Pemecahan Masalah pada Siswa Kelas V SDN 02 Kelam Tengah Kabupaten Kaur*. Skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: FKIP Universitas Begkulu.
- Banks, J.A. (1984). *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. 3rd eds. Masschusetts: Allyn & Bacon, Inc.
- Banks, J.A. (1995). Transformative Challenges to the Social Sciences Disciplines: Implications for Social Studies Teaching and Learning. *Theory and Research in Social Education*, Vol. XXIII(1), 2-20.
- Banks, J.A. (2006). *Race, Culture, and Education*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group..
- Banks, J.A. (2009). *Knowledge Construction and the Education of Citizens in Diverse Societies*. A paper presented as the keynote address at the conference Interkulturell Pedagogik, September 23, 2009, held at the Göteborg Convention Centre, Gothenburg, Sweden.
- Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1977). *Defining the Social Studies*. Virginia: National Council for the Social Studies.
- Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1978). *The Nature of the Social Studies*. Palm Spring CA: ETC Publications.
- Becker, J.M. (1965). Emerging trends in the social studies. *Educational Leadership*, 22(5): 317-321, 359.
- Belen, S. (2010). *Sejarah kurikulum SD di Indonesia*. Jakarta: Puskur-Balitbang Kemendiknas.
- Bruner, J.S. (1978). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cornbleth, C. (1985). Critical Thinking and Cognitive Processes. Dalam Stanley, W. (ed). *Review of Research in Social Studies Education: 1976-1983*. New York: NCSS, 11-64.
- Darmadi, H. (2010). Pembelajaran IPS melalui Metode Inkuiri pada Siswa SMP Negeri di Kabupaten Bengkayang (Studi Pengembangan Model Pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Bengkayang Tahun Pelajaran 2010/2011), (<http://hamiddarmadi.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-ips-melalui-metode-inkuiri.html>) diakses 26-11-2014.
- Darmawan. (2010). Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan

- Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPS di MI Darrusaadah Pandeglang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 11(2), 21-29.
- Dewey, J. (1910). *How We Think*. Boston-New York-Chicago: D.C. Heath & Co. Publishers.
- Dewey, J. (1938). *Logic the Theory of Inquiry*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dewey, J. (1964). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Mcmillan Co.
- Fitriana, NK., Wirahayu, Y.A., & Purwanto. (2013). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Geografi Siswa SMA. *Jurnal Online Universitas Negeri Malang* (<http://jurnal-online.um.ac.id/article/do/detail-article/1/41/1564>) diakses 26-11-2014.
- Fullinwider, R.K. (1991). Philosophical Inquiry and Social Studies. Dalam J.P. Shaver (ed). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: Macmillan Publishing Company, 16-26.
- Hasan, S.H. (2010). *Perkembangan kurikulum SMP (dari masa Hindia Belanda, pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan)*. Jakarta: Puskur-Balitbang Kemendiknas.
- Holsti, R. 1969. *Content Analysis for Social Science and Humanities*. Addison Westly Publishing Company, Massachussets.
- Hunt, M.P. & Metcalf, L.E. (1955). *Teaching High School Social Studies: Problems in Reflective Thinking and Social Understanding*. New York: Harper & Brothers Publisher.
- Jamil. (2000). *Penggunaan Metode Latihan Inkuiri dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar*. Laporan penelitian. Jakarta: Lemlit-UT.
- Jarolimiek, J. (1977). *Social Studies in Elementary School*, (5th ed). New York: McMillan Publishing Co, Ltd.
- Kuhn. T.S. (1970). *The structure of Scientific Revolutions* (2nd ed., enlarged). London: The University of Chicago Press, Ltd.
- Lee, S. (2000). Transformative Citizenship: A Redefinition of Citizenship in a Multicultural Society. *The SNU Journal of Education Research*, Vol. 10(6), 1-17.
- Lindquist, T. (1995). *Seeing the Whole through Social Studies*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Martorella, P.H. (1985). *Elementary Social Studies: Developing Reflective, Competent, and Concerned Citizens*. Boston, Toronto: Little, Brown and Company.
- Massialas, B.G., & Cox, C.B. (1966). *Inquiry in Social Studies*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- McCutcheon, S.P. (2001). A Discipline for the Social Studies. Dalam M.A. Previte, & J. James (eds). *The NCSS Credential Addresses: Perspective on the Social Studies*. Silver Spring, Maryland: NCSS-ERIC Eric Clearinghouse of Social Studies/Social Science Education, 227-238.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- NCSS. (1993). A Vision of Powerful Teaching and Learning in the Social Studies: Building Social Understanding and Civic Efficacy. *Social Education Journal*, Vol. 57(5). USA: NCSS. 213-223.
- NCSS. (1994). *Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Washington: NCSS
- NCSS. (2010). *National Curriculum Standards for Social Studies: A framework for teaching, learning, and assessment*. Silver Spring, MD: NCSS.
- Noviani, L. (2010). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis melalui *Integrated Learning* pada Mata Pelajaran IPS SMP. *Paedagogia*, Vol. 13(2), 173 – 187.
- Pace, J. L. (2007, December 19). Why we need to save (and strengthen) social studies. *Education Week*, 26-27.
- Parker, W.C. (1991). *Renewing Social Studies Curriculum*. Virginia: ASCD.
- Poerwanti, J.I.S. (2009). Peran Global Education dalam Pembelajaran IPS-SD. *Inovasi Pendidikan*, Vol. 10(1), 49 – 56.
- Ricoeur, P. 1991. *From Text to Action: Essays in Hermeneutics*. Illinois: Northwestern University Press.
- Ross, E.W. (1985). *The Evolution of the Relationship between Reflective Inquiry and Social Studies Education: Implications for the Future*. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council for the Social Studies, Chicago, IL, November 1985.
- Ross, E.W. (1994). Reflective Practice in Social Studies. *Buletin Number 8*. New York: NCSS.
- Ross, E.W., & Hannay, L.M. (1986). Towards a Critical Theory of Reflective Inquiry: Theme. *Journal of Teacher Education*, Vol. 37(9), 9-15.
- Sari, D.F. (2014). Pemecahan Masalah Berdasarkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa dalam Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3(8), (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6782/6991>) diakses 26-11-2014.
- Sari, O.N., Soekamto, H., & Astina, I.K. (2013). Pengaruh Model Pembelajaran *Learning Cycle "5E"* terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi. *Jurnal Online Universitas Negeri Malang* (<http://jurnal-online.um.ac.id/>)

- article/do/detail-article/1/41/1566) diakses 26-11-2014.
- Saxe, D.W. (1991). *Social Studies in Schools: A History of The Early Years*. New York: State University of New York.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.
- Somantrie, H. (2010). *Perkembangan Kurikulum Sekolah Menengah Atas di Indonesia: Suatu Perspektif Historis dari Masa Ke Masa*. Kemendiknas-Balitbang-Puskur.
- Stanley, W.B. (1985a). Research in Social Education: Issues and approaches. Dalam W.B. Stanley (Ed.) *Review of research in social studies education: 1976-1983*. (pp. 1-8). Boulder, Colorado, Washington, DC: ERIC, NCSS & SSEC.
- Stanley, W.B. (1985b). Recent Research in the Foundation of Social Education: 1976-1983. Dalam W. Stanley, (ed). *Review of Research in Social Studies Education: 1976-1983*. Washington DC: NCSS, 309-400.
- Stemler, S. 2012. "An Overview of Content Analysis." *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 7(17): pp. 1-10.
- Sumarno. (2013). Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui Aplikasi Model Belajar *Mind Mapping*. *Jurnal Pendidikan*, 14(2), 88-96.
- Sunal, C.S & Haas, M.E. (1993). *Social Studies and the Elementary/Middle School Student*. Orlando: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Tjahjono, H., & Aji, C.P. (2010). Implementasi Peta Pikiran (*Mind Map*) dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa SMP di Kota Semarang. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, Vol. 39(1), 36-47.
- Vinson, K.D., & Ross, E.W. (2001). In Search of the Social Studies Curriculum: Standardization, Diversity, and a Conflict of Apperances. Dalam E.B. Stanley, (ed). (2001). *Critical Issues in Social Studies Research for the 21st Century*. USA: Information Age Publishing Inc, 39-72.
- Wesley, E.B. & Stanley P. Wronski. (1950). *Teaching social studies in high schools*. 3rd ed. Boston: D.C. Heath and Company.
- Widyasari, M., Soekamto, H., & Wirahayu, Y.A. (2013). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)* terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran Geografi SMA. *Jurnal Online Universitas Negeri Malang* (<http://jurnal-online.um.ac.id/article/do/detail-article/1/41/1562>) diakses 26-11-2014.
- Winataputra, U.S. (2011). Dinamika Konseptualisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Pendidikan Dasar dan Menengah: Suatu Telaah *Collective Mindset* dalam Ranah Historis-Epistemologis. *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 1-20.
- Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. 2009. "Qualitative Analysis of Content. In B. Wildemuth (ed.), *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science* (pp.308-319). Westport, CT: Libraries Unlimited.